



Membumikan Revolusi Mental

Salam revolusi mental! Tak terasan Gerakan Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi JK telah berusia setahun. Pertanyaannya adalah apakah diusianya yang menginjak setahun ini Revolusi Mental memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan mental bangsa Indonesia? Apakah krisis karakter bangsa ini telah berakhir? Apakah sikap toleransi bangsa ini makin meningkat? Apakah pemerintah selalu hadir setiap dibutuhkan masyarakat? Apakah sekarang ini masyarakat semakin menentukan atau masih tetap sama dimana masyarakat tetap menjadi obyek pembangunan sebagaimana 32 tahun masyarakat hidup bersama rezim Orde Baru.

Pertanyaan-pertanyaan evaluatif seperti ini penting untuk memastikan apakah Gerakan mulia Revolusi Mental ini tetap dalam jalur yang sama, sebagaimana diharapkan presiden Jokowi : mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa - bangsa lain di dunia. Dan saat ini menjadi momentum yang tepat karena sebentar lagi integrasi ekonomi masyarakat ekonomi Asean akan diberlakukan. Bahkan jauh sebelum Jokowi JK mengungkan harapannya, Presiden pertama Indonesia, Soekarno pernah mengatakan bahwa “Revolusi Mental merupakan satu gerakan untuk menggembelng manusia Indonesia

agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala”.

Berbagai fenomena yang ada justru mengungkap hal yang sebaliknya. Harapan tidak selamanya bisa diwujudkan dalam kenyataan. Berbagai fenomena itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2015 terdapat catatan miring terkait kinerja anggota parlemen yang mencerminkan sikap mental dan karakter sebagai warga bangsa yang jauh dari revolusi mental.

Pertama, minta dana “ini-itu” (Kompas.com/02/11/2015). Setidaknya ada tiga permintaan DPR yang menimbulkan kritik, bahkan dari internal anggota DPR sendiri sepanjang 2015. Rencana tujuh megaproyek di lingkungan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo sudah menolak rencana itu. Namun, jelang pengesahan RAPBN 2016 pada 30 Oktober 2015, muncul anggaran Rp 740 miliar untuk pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi. Lima proyek lain akan dikerjakan secara bertahap menggunakan anggaran tahun selanjutnya. DPR juga meminta dana aspirasi di daerah pemilihan. Jumlahnya mencapai Rp 20 miliar per anggota. Setelah mendapatkan kritik tajam, pemerintah memutuskan menolak usulan dana aspirasi ini dan tidak mengalokasikannya dalam APBN 2016 (Kompas.com/06/07/2015). Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR



mengusulkan kenaikan tunjangan wakil rakyat. Kenaikan itu untuk tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. Pemerintah menyetujui sebagian kenaikan tunjangan itu, sehingga total pendapatan anggota DPR per bulan naik Rp 10 juta per orang.

Kedua, pemukulan anggota DPR (Kompas.com/30/11/2015). Ribut antaranggota parlemen terjadi pada 8 April 2015. Anggota Komisi VII dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Mustofa Assegaf, memukul Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi. Adegan kekerasan itu terjadi di sela-sela rapat Komisi VII DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, April 2015. Merasa tersinggung karena tidak diizinkan oleh Mulyadi untuk berbicara lebih lama dalam rapat, Mustofa memukul Mulyadi saat hendak menuju toilet di belakang ruang rapat.

Ketiga, sidang pelanggaran etik p i m p i n a n D P R (Kompas.com/19/10/2015). Di semester kedua 2015, pimpinan DPR digoyang oleh dua kasus pelanggaran etika. Pada awal September 2015, Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, diadakan karena pertemuan mereka dengan calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di New York. Di tengah wacana pemanggilan ketiga pada 19 Oktober 2015, tersiar kabar bahwa keduanya telah diperiksa secara diam-diam oleh dua pimpinan MKD, yakni Surahman Hidayat dan Sufmi Dasco Ahmad, pada 15 Oktober. Hasil dari sidang tertutup MKD itu adalah

Novanto dan Fadli divonis bersalah dan dianggap melakukan pelanggaran ringan. Sepanjang November-Desember 2015, Novanto kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said karena dugaan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI). Perkara ini muncul karena adanya rekaman pembicaraan antara Novanto, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin. Atas perkara ini, Presiden Joko Widodo merasa marah karena ia merasa lembaga negara dipermainkan. Kejaksaan Agung pun ikut mengusut dugaan pemufakatan jahat dalam kasus tersebut. Akhirnya Novanto Mundur dari Pimpinan DPR.

Keempat, kinerja legislasi jeblok (Kompas.com/08/10/2015). Setelah setahun lebih sejak dilantik pada Oktober 2014, DPR baru mengesahkan dua undang-undang. Padahal, ada 39 rancangan undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional 2015. Kedua UU yang disahkan merupakan revisi terbatas atas UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Di tengah sorotan tentang rendahnya kinerja legislasi, DPR memicu polemik akibat adanya usulan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal ini, DPR dianggap ingin mengebiri kewenangan KPK sekaligus memperlemah kekuatan lembaga antirasuah tersebut.

Kelima, dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 55 anggota DPR dijerat k a s u s k o r u p s i



(Kompas.com/31/12/2015). Khusus tahun 2015, ada tiga anggota legislatif yang terjerumus dalam pusaran korupsi. Pada 9 April 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adriansyah. Penangkapan dilakukan di sela-sela Kongres VPDI-P di Bali. Adriansyah terbukti menerima suap Rp 1 miliar, 50.000 dollar AS, dan 50.000 dollar Singapura untuk memuluskan izin tambang di Tanah Laut. Atas perbuatannya, ia diganjar hukuman tiga tahun penjara. Perkara korupsi juga menjerat anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Ia didakwa menerima suap Rp 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, untuk mengamankan kasus dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung. Perkara ini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Operasi tangkap tangan oleh KPK juga dialami anggota Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, pada 20 Oktober 2015 di Bandara Soekarno-Hatta. Dewie diduga menerima suap agar proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua, masuk dalam pembahasan APBN 2016.

Revolusi Mental sepertinya dipandang oleh elite politik Senayan hanya berlaku untuk aparat pemerintah saja dan tidak berlaku bagi dirinya. Sehingga hal seperti ini justru membuat masyarakat makin menjauh dan acuh terhadap revolusi mental karena keteladanan elite yang tidak ada. Beberapa krisis karakter bangsa juga bisa dilihat setiap hari misalnya bagaimana seorang polisi tanpa alasan yang jelas menilang pengemudi kendaraan.

Kisah Heru Danuarsi yang ditilang polisi saat di Cirebon, Perkaranya cuma satu dia ditilang karena lampu depan motor Yamaha YZF-R15 miliknya hanya menyala satu. Uniknya lagi, polisi tidak memberikan surat tilang malah meminta uang 500 ribu atas pelanggaran tersebut. Heru tetap tidak mau membayar tapi polisi ngotot harus bayar. Ketika diberi Rp 200 ribu, oknum polisi itu pun membolehkan Heru pergi (Merdeka.com.2015).

Tentu masih banyak kisah menarik lainnya yang mencerminkan gerakan revolusi mental masih membutuhkan kerja keras semua pihak. Keteladanan elite baik pemerintah, legislatif dan kalangan penegak hukum perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam implementasi revolusi mental. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa beberapa pertanyaan diatas terkait signifikansi pengaruh revolusi mental terhadap berakhirnya krisis karakter, berakhirnya intoleransi, meningkatnya peran DPR dan pemerintah yang selalu hadir ditengah-tengah kepentingan rakyat belum bisa dijawab.

Mengapa perlu revolusi mental? Berbagai fenomena di atas sebenarnya cukup mewakili dan bisa menjawab pertanyaan ini. Masyarakat Indonesia sendiri merasa resah melihat perilaku, sikap serta mentalitas kita yang saling serobot di jalan raya, tak mau antre, kurang penghargaan terhadap orang lain (revolusimental.go.id). Dari hasil FGD (kelompok diskusi terfokus) di Jakarta, Aceh, dan Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Revolusi Mental Rumah Transisi, memberikan gambaran keresahan



masyarakat tentang karakter kita sebagai bangsa. FGD ini melibatkan 300 orang budayawan, seniman, perempuan, netizen, kaum muda, pengusaha, birokrat, tokoh agama/adat, akademisi dan LSM. Kesimpulan yang didapat adalah kita memang butuh mengubah mentalitas secara revolusioner karena adanya gejala : krisis nilai dan karakter, krisis pemerintahan: pemerintah ada tapi tidak hadir, masyarakat menjadi obyek pembangunan, krisis relasi sosial : gejala intoleransi. sebagian dari fenomena diatas cukup mewakili.

Beberapa kutipan hasil FDG di bawah ini bisa dijadikan sebagai evidence bahwa mengubah mentalitas bangsa menjadi prioritas pemerintahan Jokowi JK.

"Ada sesuatu yang salah tentang nilai. Ada nilai luhur bangsa yang terlupa...", Tokoh Sektor Privat, FGD Jakarta.

"...Orang yang berperilaku baik, Jujur dan bersih justru tidak populer, mereka yang baik menjadi musuh bersama.", Birokrat, FGD Aceh.

"...Peradaban Indonesia sedang berhenti...". Seniman, FGD Jakarta.

"Birokrasi sekarang: Gendut, berbelit, rapuh", Birokrat, FGD Jakarta.

"Di Kemenpora, program kebanyakan seminar saja. Kedepan harus lebih fokus dalam pembangunan mental demi masa depan Indonesia.", Tokoh Muda, FGD Aceh.

"Penegakkan hukum gak jelas antara yang salah dan benar tapi tergantung lobby. Kita cenderung menghormati orang dari penampilannya, bukan apa yang dilakukan", Tokoh Sektor Privat, FGD Jakarta.

"Saya pikir dalam waktu 5 tahun terakhir ini kondisi semakin buruk karena pemerintah semakin tidak mendengarkan (rakyat), ada, tapi tidak hadir.", Netizen, FGD Jakarta.

"Respons Pemerintah lama, masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri", Tokoh LSM, FGD Jakarta.

"Masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah", Tokoh LSM, FGD Jakarta.

"Yang perlu diubah adalah mentalitas proyek", Tokoh Agama, FGD Jakarta.

"Saat ini kita berada dalam situasi bahwa toleransi mengalami kemunduran dibandingkan 15 tahun yang lalu", Tokoh Agama, FGD Jakarta.

Berbagai ungkapan diatas menandakan bahwa hampir semua lapisan masyarakat memiliki kecemasan yang sama dalam memandang krisis krisis karakter/mentalitas sebagai bangsa yang mengalami penurunan. Diperlukan sejumlah strategi untuk mengatasinya agar kecemasan masyarakat tidak berubah menjadi sikap apatis dan tidak percaya dengan pemerintahan yang ada.

Karlina Supeli (2015:6) mendefinisikan revolusi mental sebagai merupakan transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, semangat dan moralitas yang menjelma ke dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Apa yang akan menjadi dasar bagi perubahan itu? Dalam bingkai kehidupan berbangsa saat ini, Revolusi mental hanya bermakna apabila dilandasi oleh



keinginan untuk mengoreksi cara berkebiasaan kita dalam semua bidang kehidupan, sedemikian, sehingga semua itu diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama. Menurut Supeli, revolusi mental harus diarahkan untuk merombak kebudayaan pada tiap-tiap lapisannya, yaitu lapis makna (cara masyarakat menafsirkan diri, nilai dan tujuan-tujuan serta mengevaluasinya), lapis kebiasaan (sikap dan laku sehari-hari), dan materialitas karya cipta manusia (termasuk ilmu dan teknologi) yang melandasinya.

Revolusi mental dengan demikian dapat dimaknai sebagai transformasi dalam tiga aspek manusia, yaitu aku yang percaya, aku yang berpikir, dan aku yang bertindak. Namun, transformasi itu berlangsung bukan hanya pada skala individu melainkan mencakup skala seluas bangsa. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan sebagainya. Begitu rupa, sehingga mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan sehari-hari) l a m b a t - l a u n b e r u b a h . Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diarahkan untuk proses transformasi itu.

Sementara itu, Haryatmoko (2015), memaknai revolusi mental sebagai perubahan mendasar 'mindset' (pola pikir) masyarakat dan penguasa di dalam kehidupan berbangsa. Revolusi Mental tidak cukup mengandalkan niat baik, namun harus memperhitungkan perubahan struktural dalam interaksi masyarakat. Perubahan semacam itu, menurut Haryatmoko dengan mengacu ke Giddens (1993), harus menyentuh tiga bentuk interaksi sosial yang dominan,

yaitu dalam hal komunikasi, hubungan kekuasaan, dan moralitas. Maka disebut struktural karena perubahan ketiga bentuk interaksi sosial itu menentukan warna ketiga struktur utama masyarakat (pemaknaan, dominasi, dan legitimasi).

Di ranah politik, menurut Haryatmoko revolusi mental harus memperhitungkan ketiga struktur utama hasil interaksi sosial itu, yaitu cara pemaknaan, kualitas dominasi dan legitimasi kekuasaan. Ketiga hal ini mengondisikan pola pikir masyarakat, sehingga Revolusi Mental menuntut perubahan struktural itu dalam bentuk:

Pertama, perubahan orientasi dari politik sebagai upaya mencari kekuasaan menjadi politik sebagai usaha meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Maka perubahan mendasar pertama ini menyangkut perubahan kerangka penafsiran dalam kehidupan politik yang bukan lagi berorientasi kepada kekuasaan, tapi pelayanan publik. Kerangka penafsiran baru ini merupakan modalitas interaksi komunikasi yang akan menentukan kualitas strukturnya, yaitu pemaknaan. Dengan demikian semua bentuk kegiatan politik bisa dikatakan bermakna bila diarahkan ke pelayanan publik.

Kedua, perubahan sikap pejabat publik dan politisi. Mereka harus memiliki kemampuan memberi pelayanan yang berkualitas, artinya responsif terhadap kebutuhan publik dan memenuhi standar profesional. Untuk tujuan itu, pejabat publik harus memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan, dan kompetensi etis. Maka kriteria seleksi pejabat publik dan politisi harus ketat dan berjenjang,



termasuk dalam seleksi calon legislatif. Dalam ranah politik, terutama dalam interaksi kekuasaan, kriteria seleksi pejabat publik yang dituntut memiliki integritas dan kompetensi ini harus diperhitungkan karena akan memengaruhi kualitas dominasi (pemerintah, parlemen, dan yudikatif) agar menjadi kekuasaan yang melayani. Padahal kualitas dominasi tergantung pada modalitasnya, yaitu fasilitas yang dimiliki (ekonomi, budaya, politik, ideologi, sosial) dan strategi penempatan kapital (Bourdieu). Secara lebih sistematis P. Bourdieu merumuskan modalitas itu dalam bentuk empat kapital: ekonomi, budaya, sosial, dan simbolis.

Ketiga, perlu perubahan orientasi politik, yaitu dari orientasi politik partisan menuju ke politik kewarganegaraan di mana warga negara diperlakukan setara di depan hukum, sebagai individu yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, bukan politik partisan yang cenderung diskriminatif karena memperlakukan warga negara sebagai anggota suatu kelompok kepentingan tertentu. Dengan menekankan tatanan hukum yang menghormati hak-hak dan kewajiban setiap warga negara yang sama, kekuasaan mendasarkan diri pada legitimasi yang kokoh. Legitimasi sebagai dasar pembenaran tindakan atau kekuasaan ini ditentukan oleh atau mengacu ke modalitasnya yang berupa norma. Norma ini bisa meliputi undang-undang, hukum, adat atau kebiasaan. Dengan mengacu ke norma bersama (Pancasila) representasi kekuasaan dan wakil rakyat mendasarkan pada legitimasi yang disepakati bersama. Ketiga implikasi

revolusi mental tersebut di atas akan dikembangkan secara sistematis dalam penjelasan di bawah ini.

Dari kedua pemikir kebudayaan di atas, upaya membudayakan revolusi mental perlu ditempuh melalui strategi kebudayaan. Supeli mengusulkan melalui pendidikan untuk menghadirkan manusia berbudaya yang berorientasi pada nilai. Karenanya, pendidikan tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan tentang baik buruk, tetapi melatih hasrat peserta didik sampai terbentuk disposisi batin untuk selalu menghendaki yang baik (Supeli, 2015:8).

Berbeda dengan Supeli, Haryatmoko (2015:29-30) merujuk pada pemikiran Bourdieu (1994) lebih menekankan pada dimensi strukturalis yakni terkait dengan habitus. Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) di lingkungan social tertentu. Melahirkan sosok pejabat publik yang berintegritas, justru masyarakat perlu pemberdayaan. Kejujuran, kerja keras, dan kepedulian pemimpin akan kebutuhan masyarakat adalah habitus, hasil pengalaman panjang dari interaksi pemimpin dengan rakyatnya. "Sebagai buah dari sejarah, habitus menghasilkan praktik-praktik, baik individual maupun kolektif, sesuai dengan skema yang dikandung oleh sejarah. Habitus menjamin kehadiran aktif pengalaman-pengalaman masa lalu dalam bentuk skema persepsi, pemikiran dan tindakan, terutama semua aturan formal dan norma tersurat, untuk menjamin kesesuaian praktik-praktik sepanjang waktu. Biasa melayani masyarakat dan jujur merupakan hasil



pelatihan. Habitus seperti itu akan menjadi nilai dan norma yang disebut etos karena sudah menjadi prinsip dan nilai yang dipraktikkan atau bentuk moral yang dibatinkan, meski tidak harus selalu mengemuka dalam kesadaran, namun efektif mengatur perilaku sehari-hari.

Menurut Haryatmoko (2015: 30) etos semacam itu tidak diperoleh di bangku kuliah, namun diperoleh melalui pengalaman, yang kemudian diorganisir dan direfleksikan. Kepedulian terhadap masyarakat kecil bukan buah dari kunjungan kerja atau mempelajari aspirasi mereka, tetapi dengan terlibat berjuang bersama mereka. Habitus merupakan struktur mental yang selalu dalam proses restrukturisasi. Jadi praktik- praktik dan representasi kita tidak sepenuhnya deterministik (pelaku bisa memilih), namun juga tidak sepenuhnya bebas (pilihannya ditentukan oleh habitus). Praktik-praktik kehidupan tidak hanya bentuk pelaksanaan norma-norma yang sudah tersurat, namun menerjemahkan makna praktis yang sudah diperoleh melalui habitus. Dengan tanpa mencari lagi maknanya atau mengangkat ke kesadaran, habitus mengarahkan sesuai dengan posisi yang ditempati pelaku menurut logika arenanya.

Revolusi mental dengan demikian adalah soal keteladanan. Keteladanan seorang pemimpin yang memungkinkan lahirnya kepercayaan dari rakyatnya secara perlahan-lahan. Keteladanan adalah sebuah praktek melaksanakan etos kerja, integritas dan gotong royong dalam rangka membangun sebuah kebaikan dalam lingkungan social kemasyarakatan, pemerintahan, politik dan penegakan

hukum dan berbagai sector lainnya.

Kualitas pemimpin yang berkarakter dan memiliki integritas dan akuntabilitas yang baik tidak turun dari langit, namun dibentuk sejak dini oleh lingkungan pendidikan keluarga, kemudian berkembang disekolah, lingkungan masyarakat dan teruji dalam praktik kehidupan professional, terutama keterlibatannya di berbagai organisasi yang digelutinya. Karena itu, membumikan karakter bangsa atau sikap mental yang baik harus dari lingkungan terkecil yakni keluarga sejak usia dini. Wallahu a'lamu bishawab. **Mariman Darto**

Bibliografi

- Haryatmoko. Revolusi Mental di Ranah Politik: Orientasi Pelayanan Publik dan Pola Baru Seleksi Pejabat Publik. Dalam Semiarto Aji Purwanto. Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan (Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, 2015.
- Karlina Supeli. Revolusi Mental sebagai Paradigma Strategi Kebudayaan. Dalam Semiarto Aji Purwanto. Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan (Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, 2015.
- Wirutomo, Paulus. Revolusi Mental untuk Indonesia. <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Revolusi-Mental-untuk-Indonesia-.pdf>. Diunduh pada 23 Desember 2015



- Kompas. Banyak Menteri yang Dinilai Tak Paham Revolusi Mental. <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/13/21130041/Banyak.Menteri.yang.Dinilai.Tak.Paham.Revolusi.Mental>. Diunduh 23 Desember 2015
- Kompas.com. Alokasikan Rp 740 Miliar pada APBN 2016 untuk Bangun Ruang Kerja Anggota. <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/31/06395461-/Lima.Catatan.Miring.DPR.2015>. Diunduh tanggal 1 Januari 2015.
- Kompas.com. Istana: Sudah Final, tidak akan ada Dana Aspirasi pada RAPBN 2016. http://nasional.kompas.com/read/2015/07/06/16515081/Istana.Sudah.Final.Tidak.Akan.Ada.Dana.Aspirasi.pada.RAPBN.2016?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd. Diunduh tanggal 23 Desember 2015.
- Kompas.com. Pukuli Pimpinan Komisi VII, Mustofa Assegaf Diskors 3 Bulan. <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/30/21370001/Pukuli.Pimpinan.Komisi.VII.Mustofa.Asegaf.Diskors>. Diunduh tanggal 23 Desember 2015.
- 3.Bulan?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd. Diunduh 23 Desember 2015
- Kompas.com/19/10/2015. MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan. http://nasional.kompas.com/read/2015/10/19/16311181/MKD.Putuskan.NovantoFadli.Langgar.Kode.Etik.Ringan.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd. Diunduh tanggal 23 Desember 2015.
- Kompas.com. ICW: DPR Setahun Tanpa Kerja. http://nasional.kompas.com/read/2015/10/08/06200001/ICW.DPR.Setahun.Tanpa.Kerja?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd. Diunduh tanggal 23 Desember 2015.
- Merdeka.com. Yamaha YZF-R15 Ditilang karena Lampu Menyala hanya Satu. <http://www.merdeka.com/otomotif/4-aksi-polisi-tilang-dengan-alasan-konyol/yamaha-yzf-r15-ditilang-karena-lampu-menyalahanya-satu.html>. Diunduh tanggal 23 Desember 2015.